

SEJARAH POLITIK IBU di INDONESIA

**Ita Fatia Nadia
Ketua RUAS (Ruang Arsip dan Sejarah)
Perempuan Indonesia**

**Makassar International Writers Festival
25 Mei 2024**



Sukarno, dan melibatkan semua orang Indonesia untuk menjalankan tugas membangun sebuah nation atau bangsa yang baru merdeka. Menurut Sukarno nasionalisme adalah “bangunan” yang menjadi tanggungjawab semua rakyat perempuan dan laki-laki (Sukarno, dalam Suluh Indonesia Muda, 1948).



Sukarno memberikan kursus politik pada perempuan di Istana Yogyakarta, 17 Des. 1947. Sumber foto Perpunas.

Konsolidasi Pemikiran dan Perjuangan Perempuan Kemerdekaan Indonesia

Kongres Wanita Nasional Indonesia pertama diadakan di Yogyakarta pada bulan Desember 1928. Tiga puluh organisasi wanita menghadiri kongres tahun 1928 tersebut.

22 Desember 1928 adalah melakukan konsolidasi pemikiran dan semangat perjuangan, menuju kemerdekaan dan perbaikan nasib kaum perempuan saat itu.

Agenda utama Konggres adalah persatuan perempuan Nusantara; peranan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan; perbaikan gizi; kesehatan ibu dan anak; melarang pernikahan usia dini, anti poligami; dan perdagangan perempuan.

Pendirian Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII).

Keterlibatan Perempuan dalam perjuangan nasional.

Penggunaan bahasa Indonesia.

Pendirian Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia.

SALAWATI DAUD



Salawati Daud merupakan perempuan Indonesia pertama yang menempati posisi [walikota](#). Ia menjadi walikota di Makassar, [Sulawesi](#) pada tahun [1949](#). Tak hanya itu, ia juga tercatat sebagai walikota Makassar yang pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Masa jabatan 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950



Fransisca Fanggal
Tokoh Perempuan Indonesia, lahir di
Pulau Rote, NTT dan Tumbuh di Surabaya.



Sebagai anggota konstituante Setiati
mendesak kabinet Djuanda untuk meratifikasi
konvensi ILO No.100 th 1951, dimana
kemudian Indonesia menjadi negara ke 21
yang meratifikasi konvensi ILO No.100 tahun
1951 tentang persamaan upah dan anti
diskriminasi.



**Tanggal 22 Desember 1959
Presiden Soekarno
mengeluarkan Dekrit
Presiden No.316 tahun 1959
sebagai Hari Ibu. Penetapan
itu dimaksudkan untuk
memberikan penghormatan
kepada kaum perempuan,
yang terlibat dalam
perjuangan kemerdekaan
dan kebangsaan.**

Penghancuran Peran Perempuan setelah peristiwa 30 September 1965 mengubah geo-politik Indonesia.

Proyek kebangsaan diambil alih oleh negara (pemerintah Orde Baru) dengan peran utama militer, menggunakan pendekatan militeristik dan bersifat authoriter, dengan mengubah sejarah untuk menjalankan misi membentuk konsep bernegara dan berbangsa.

Ketiga tokoh itu yang bertanggungjawab adalah Jenderal Ali Moertopo, Jenderal Soemitro kepala KOPKAMTIB, Jenderal Benny Moerdani dan Jenderal Soeharto. Sebagai titik pusat mengolah kebangsaan-negara (Peter Britton, 1996, hal 78).

Depolitisasi organisasi perempuan dan tugas pokok perempuan adalah sebagai ibu.

Gender Rejim Orde Baru : Ibuisme.

Panca Dharma Wanita:

WANITA SEBAGAI PENDAMPING SUAMI YANG SETIA.

WANITA SEBAGAI PENERUS KETURUNAN BANGSA.

WANITA SEBAGAI PENDIDIK DAN PEMBIMBING ANAK.

WANITA SEBAGAI PENGELOLA RUMAH TANGGA

Wanita Sebagai PENCARI NAFKAH TAMBAHAN.

Setelah 65, negara-bangsa Indonesia dibangun/didirikan bersumber dari memori dan institusi maskulin, yang menggunakan kekerasan dan penyiksaan untuk menjawab setiap gerakan anti pemerintah (Robert Cribb, 1990, p.23; Cynthia Enloe, 1989,p.45; Robert W. Connell, 1995, p.40)

Dari perspektif jender, Orde Baru mendefinisikan perempuan bukan sebagai kawan perjuangan. Tetapi sebagai mahluk yang penurut, ibu rumah tangga dan pengabdian (Saskia Wieringa, 2003,p.72).

Terima Kasih